

**KEMISKINAN NELAYAN DI DESA BUSUNG PANJANG KECAMATAN
SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

**ELLY KURNIAWATI
NIM : 110563201043**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017**

KEMISKINAN NELAYAN DI DESA BUSUNG PANJANG KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA

ELLY KURNIAWATI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kehidupan para nelayan sebagian besar di bawah garis kemiskinan. Dari data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa jumlah kemiskinan di Kabupaten Lingga mencapai 14,03 %. Nelayan merupakan salah satu pekerjaan utama penduduk Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga saat ini. Selama ini bantuan itu saja tidak cukup, nelayan di Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga tidak bisa menjual langsung ikan hasil tangkapan ke pembeli, akses pemasaran mereka sangat terbatas sehingga mereka tetap merasakan kesulitan menjual hasil tangkapannya. Mereka saat ini harus menjual ikannya dengan tengkulak dengan harga sangat murah, hal ini yang membuat nelayan tidak bisa keluar dari kemiskinan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa nelayan di Desa Busung Panjang masih miskin walaupun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan Nelayan di Desa Busung Panjang Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga masih tetap miskin. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Nelayan di Desa Busung Panjang masih miskin walaupun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah karena adanya faktor kemiskinan kultural, kemiskinan kultural dimana masyarakat sejak dahulu sulit untuk keluar dari kemiskinan tersebut, mereka hanya berhadap oleh bantuan yang diberikan pemerintah.

Kata Kunci : Kemiskinan, Nelayan

ABSTRACT

Poverty is a complex problem of well-being that is affected by a variety of interrelated factors. Most of the fishermen's lives below the poverty line. From the data obtained from the Central Bureau of statistics noted that the amount of poverty in the Lingga Regency reached 14.03%. Fishing is one of the main occupation of the villagers Long Regency Lingga Edema at the moment. During the time that assistance alone is not enough, the fishing village of Lingga Regency Long Edema could not sell the fish directly to buyers, access their marketing is very limited so that they continue to feel the difficulty of selling the results of her catch. They currently have to sell fish with very cheap prices with the middleman, this thing that makes fishermen can't get out of poverty.

The purpose of this research is to find out why the fishermen in the village Long Edema still poor despite assistance from the Central Government and the regions, to find out the factors that lead to the fishing village of Edema Long Sub Singkep Barat Regency Lingga still remains poor. In the discussion of the thesis is descriptive qualitative research uses. Informants in this study is taken using a Purposive sampling technique. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques.

Based on the research results then can be drawn the conclusion that the fishermen in the village Long Edema still poor despite assistance from the Central Government and regions due to cultural factors of poverty, cultural poverty where communities since first it's hard to get out of poverty, they are dealt face only by the assistance provided by the Government.

Key Words: Poverty, Fisherman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dipandang sebagai dampak ikutan dari pembangunan dan bagian dari masalah dalam pembangunan. Keberadaan kemiskinan ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketimpangan antar wilayah. Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Esensi kemiskinan adalah menyangkut kondisi

kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan.

Diantara kategori pekerjaan terkait dengan kemiskinan, nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2006). Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu.

Kehidupan para nelayan sebagian besar di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (Departemen sosial,2002:4).

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk Lingga Pada tahun 2015 yaitu 92.762 Jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk

Dari data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa jumlah kemiskinan di Kabupaten Lingga mencapai 14,03 %. Nelayan merupakan salah satu pekerjaan utama penduduk Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga saat ini, sehingga dengan demikian sangat membutuhkan adanya program pemerintah yang secara nyata dapat menggerakkan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan. Saat ini para nelayan sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah lewat program-program yang ada. Sedangkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Lingga pada tahun 2014 sejumlah 7.329 KK yang tersebar merata di seluruh Kecamatan. Daerah yang memiliki jumlah KK miskin terbesar adalah Kecamatan Senayang dengan jumlah 2651 KK dan yang terkecil di Kecamatan Singkep Selatan dengan jumlah 81 KK. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel I.2

Jumlah Penduduk Miskin

| N O | NAMA KECAMATAN | JUMLAH KELUARGA MISKIN (KK) |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | Kecamatan Lingga | 1.096 |
| 2 | Kecamatan Lingga Utara | 1.473 |
| 3 | Kecamatan Lingga Timur | 730 |
| 4 | Kecamatan Singkep | 672 |
| 5 | Kecamatan Singkep Barat | 97 |
| 6 | Kecamatan Singkep Selatan | 81 |
| 7 | Kecamatan Singkep Pesisir | 197 |
| 8 | Kecamatan Senayang | 2.651 |
| 9 | Kecamatan Selayar | 332 |
| TOTAL | | 7.329 |

Sumber : Data Daftar Rekapitulasi PPLSD, 2015

Selama ini bantuan itu saja tidak cukup, nelayan di Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga tidak bisa menjual langsung ikan hasil tangkapan ke pembeli, akses pemasaran mereka sangat terbatas sehingga mereka tetap merasakan kesulitan menjual hasil tangkapannya. Mereka saat ini harus menjual ikannya dengan tengkulak dengan harga sangat murah, hal ini yang membuat nelayan tidak bisa keluar dari kemiskinan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan Skripsi dengan

memilih judul penelitian:
**“KEMISKINAN NELAYAN DI
DESA BUSUNG PANJANG
KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa nelayan di Desa Busung Panjang masih miskin walaupun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah?
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan Nelayan di Desa Busung Panjang Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga masih tetap miskin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui mengapa nelayan di Desa Busung Panjang masih miskin walaupun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah
2. untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan Nelayan di Desa Busung Panjang Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga masih tetap miskin

D. Konsep Operasional

Penelitian ini mengacu pada pendapat Suryawati (2005) Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan

dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

2. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
3. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif, dalam penelitian deskriptif ini, peneliti hanya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian. Menurut pendapat Sugiyono (2011:11) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel”.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi, kemudian setelah mendapatkan data maka akan di analisa dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui faktor yang membuat masyarakat nelayan Desa Busung Panjang masih miskin

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Moleong (2011:35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data. Adapun langkah – langkah analisa data yang dilakukan adalah : Reduksi Data Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. Penyajian Data Penyajian data (display data) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian- bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas

sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

II. LANDASAN TEORI

1. Administrasi Negara

Admnistrasi Negara menurut Siagian (2008 : 7) adalah “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara”. Administrasi Negara adalah usaha untuk mengendalikan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya manusia dan alami.

Kemudian Administrasi Negara juga sering disebut administrasi publik. Administrasi publik berperan untuk membuat agar kekuasaan dapat direalisasikan bagi kepentingan masyarakat. Adapun definisi administrasi publik dikemukakan Siagian (2006 : 7) bahwa ”administrasi adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam

usaha mencapai tujuan negara. Kemudian Chandler dan Plano (keban 2004:3) bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Administrasi publik dikatakan MiftaThoha (2008:17) adalah “seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan). Dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi/tata usahanya.” Selain itu pengertian administrasi publik dijelaskan Dimock, dkk (Pasolong, 2007:7) adalah “kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pengarahannya kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.”

Keterkaitan penelitian ini dengan administrasi negara yaitu penelitian ini menemukan faktor penyebab kemiskinan di Desa Busung Panjang yang nantinya akan dijadikan alat ukur untuk membuat suatu program pemberdayaan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

2. Kemiskinan

Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan

individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4)

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya *multidimensional*. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (World Bank, 2000).

Dari segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Menurut Surbakti (Usman, 2006: 136), kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari tidak kemampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi.

Kemiskinan sumber daya ekonomi melihat fenomena kemiskinan dari sisi ketiadaan atau kelangkaan sumber daya ekonomi baik faktor-faktor produksi yang berupa modal, tanah, sumber daya manusia dalam hal ini tingkat dan kualitas pendidikan maupun kondisi geografis yang terkait dengan tempat tinggal suatu masyarakat. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi si miskin. Struktur ekonomi dan politik yang kurang berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu sehingga menimbulkan hambatan-hambatan dalam akses sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan dan partisipasi dalam pembangunan.

Ukuran lain kemiskinan dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang menggunakan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Dalam ukuran ini, sebuah keluarga disebut miskin jika: (i) tidak bisa melaksanakan kewajiban rutin dalam agamanya; (ii) tidak bisa makan dua kali dalam sehari; (iii) tidak mempunyai pakaian lain

untuk bekerja/bersekolah dan melakukan aktivitas lainnya; (iv) tinggal di rumah yang sebagian besar ruangnya berlantai tanah; (v) tidak bisa membayar biaya fasilitas kesehatan. Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi

kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar, Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.

Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah tersebuti daripada dua gambaran yang lainnya.

2. Kebijakan sosial

Menurut Edi Suharto (2012:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Menurut Edi Suharto (2006 : 60) kebijakan sosial adalah ‘ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya’.

Definisi lain dengan acuan fokus pada aktor pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan diberikan oleh Pusat

Data Informasi Kesejahteraan Sosial (2009) “Kebijakan Sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Edwards III dan Sharkansky dalam Hariyoso (2002: 62) mengartikan bahwa kebijakan publik adalah pernyataan pilihan tindakan pemerintah yang berupa tujuan dan program pemerintah. Sedangkan Thomas R. Dye (dalam Sumaryadi, 2005 :19). berpendapat bahwa kebijaksanaan negara ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Abidin (2002:75) menjelaskan Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pada dasarnya kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat yang mana aturan-aturan tersebut disusun dalam beberapa bentuk kebijakan. “Kebijakan publik mempunyai sifat paksaan yang secara potensial sah dilakukan, sehingga kebijakan publik menuntut ketaatan atau kepatuhan yang luas dari masyarakat” (Winarno, 2007:21). Robert Eyestone (dalam Agustino: 2006 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas

untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.

3. Faktor Struktural dan Kultural Penyebab Kemiskinan

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas

ekonomi yang ada secara merata.

Terminologi lain yang pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosebroto dalam "Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan" (Suyanto, 1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial". Disamping itu kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya. Dari segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Menurut Surbakti (Usman, 2006: 136), kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Kemiskinan sumber daya ekonomi melihat fenomena kemiskinan dari sisi ketiadaan atau kelangkaan sumber daya ekonomi baik faktor-faktor produksi yang berupa modal, tanah, sumber daya manusia dalam hal ini tingkat dan kualitas pendidikan maupun kondisi geografis yang terkait dengan tempat tinggal suatu masyarakat.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang

disebabkan oleh faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi si miskin. Struktur ekonomi dan politik yang kurang berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu sehingga menimbulkan hambatan-hambatan dalam akses sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan dan partisipasi dalam pembangunan.

Menurut George Ritzer (2004: 25), asumsi dasar teori fungsional struktural adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan arena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, adalah fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Dalam kebijakan sosial agar mampu diterapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Sejalan dengan pendapat Edwards III (Winarno, 2007 : 174) menuliskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat faktor yaitu :

1. Komunikasi, yaitu implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan tahu apa yang dikerjakan. Pengetahuan atas yang akan dijalankan itu akan dapat

- terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik.
2. Sumber daya, yaitu sebagai apapun kebijakan, tetapi jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, maka kebijakan itu tidak akan berhasil di lapangan.
 3. Sikap pelaksana kebijakan, yaitu jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
 4. Struktur birokrasi, yaitu kebijakan yang kompleks yang menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Istilah pemberdayaan sendiri muncul sekitar pertengahan 1990-an sebagai isyarat terjadinya perubahan paradigm pembangunan. Pemberdayaan merupakan upaya mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat membangun masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya Simon (Hikmat 2006:11) mengemukakan bahwa : “ Pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya

oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self determination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat procedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan system yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik”.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemarkarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan dan kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Sementara pemberdayaan menurut Sumaryadi (2005:111) menyatakan bahwa : “ Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.”

Selanjutnya menurut Sumaryadi (2005:111) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga tahapan yaitu :

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan yang berarti juga melindungi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang amat penting bagi pembangunan masyarakat dan Negara, karena dengan pemberdayaan yang tepat sasaran dan terencana dengan baik akan menghasilkan masyarakat yang memiliki berkualitas sehingga mampu menciptakan suasana pembangunan yang dinamis dan berkesinambungan. Kemudian Wrihantolo dan Dwijowijoto (2007:2-6) menyebutkan bahwa : pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu :

1. Penyadaran

Pada tahap ini target hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Dalam hal ini dapat diberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka.

2. Pengkapasitasan

- a. Pengkapasitasan manusia dalam arti memungkinkan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok.
- b. Pengkapasitasan organisasi dilakukan

dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut.

- c. Pengkapasitasan system nilai dilakukan dengan membantu target dan membuat aturan main diantara mereka sendiri.

3. Pendayaan

Tahap memberikan target daya, kekuasaan, dan peluang. Lebih lanjut Solomon (Satria 2002:115) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk menolong klien supaya :

- a. Mendapatkan kembali eksistensi dan jati diri mereka dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi;
- b. Ilmu pengetahuan dan *skill* (keahlian dan keterampilan) pekerja sosial dapat digunakan klien secara optimal;
- c. Pekerja sosial sebagai mitra yang baik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi klien;
- d. Struktur kekuasaan rumit dapat diubah menjadi terbuka agar dapat memberi pengaruh pada kehidupan mereka.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah tindakan memandirikan masyarakat agar dapat memperbaiki

serta menentukan masa depan kehidupannya sesuai keinginan. Melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki, seperti pengetahuan, modal, gagasan, dan keterampilan.

Sementara menurut Nijikuluw (2001:7) menjelaskan bahwa berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai berikut :

- a. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh dengan harga murah dan kualitas yang baik.
- c. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
- d. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumber daya lokal, memiliki pasar yang jelas, dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya.

- e. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir atau antara pesisir dengan pedalaman.
- f. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud dari pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam laut.

Sedangkan pendapat Satria (2002:107) pemberdayaan sosial masyarakat pesisir, paling tidak memiliki 2 (dua) dimensi pokok, yaitu :

1. Dimensi kultural pemberdayaan sosial yang mencakup upaya perubahan-perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi dan kebiasaan-kebiasaan. Pemberdayaan kultural ini diperlukan untuk mengatasi kemiskinan kultural seperti pola hidup konsumtif, rendahnya kemampuan menabung, sikap subsisten atau resistensi terhadap pendidikan formal.
2. Dimensi structural yang mencakup upaya perbaikan structural sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan-perbaikan structural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi

yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa: ada dua dimensi yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu melalui pemberdayaan kultural yang mencakup perubahan perilaku ekonomi, peningkatan pendidikan, pengenalan teknologi dan perubahan pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta pemberdayaan struktural yang mencakup peningkatan kesadaran masyarakat untuk berorganisasi, peningkatan produktivitas nelayan dan lain-lain.

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasarkan kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), namun masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandiri dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

5. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Haris Hamdani (2013) tentang Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional (*The Factor Of Poverty Causes Traditional Fisherman*) diketahui bahwa Sumber daya manusia

nelayan tradisional di Kampung Pesisir pada umumnya masih sangat rendah. hal ini dapat terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan para nelayan tradisional di desa kedungringin. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan ini tidak terlepas dari budaya dan lingkungan setempat. Rendahnya tingkat pendidikan buruh nelayan bukan hanya dialami oleh buruh nelayan sebagai kepala keluarga saja, namun berimbas juga pada kepada anggota keluarga. Rendahnya pendidikan kepala keluarga ini tidak terlepas dari latar belakang keluarga dan kondisi masyarakat Desa pada waktu dulu.

Kemudian penelitian Endang Retnowati (2013) meneliti tentang Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum) diketahui dari sisi ekonomi pendapatan nelayan masih sangat rendah, sehingga mereka miskin, hal ini dikarenakan: keterbatasan modal, skill, adanya tekanan dari pemilik modal (sistem bagi hasil perikanan yang tidak adil), sistem perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (tidak ada regulasi yang tepat dan lemahnya otoritas atau pemerintah), budaya kerja yang masih tradisional atau konvensional. Kemiskinan yang dialami nelayan Indonesia menjadikan mereka lemah baik di sektor sosial, maupun politik. Hukum yang seharusnya memberikan payung perlindungan kepada nelayan ternyata belum mampu sepenuhnya melindungi.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Gatot Winoto (2006) tentang Pola Kemiskinan Di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Dari penelitian tersebut

ditemukan bahwa pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah kemiskinan subsistensi, dicirikan oleh pendapatan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak dan minimnya fasilitas air bersih; kemiskinan perlindungan, dimana lingkungan permukiman nelayan yang buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi) dan tidak adanya jaminan atas hak pemilikan tanah; kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk (rendah), terbatasnya keahlian yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah faktor ekonomi, Sosial, dan faktor pendidikan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dengan cara meminimalisir faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat setempat. Sehingga apabila pengentasan kemiskinan dilakukan sesuai dengan pola kemiskinan dan faktor penyebabnya masing-masing, maka upaya tersebut dapat lebih optimal.

Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian sebelumnya memahami tentang faktor penyebab kemiskinan serta kemiskinan struktural yang ada pada masyarakat nelayan. Sedangkan dalam penelitian ini akan meneliti Faktor penyebab kemiskinan nelayan dari faktor struktural dan kultural dari permasalahan yang terjadi

di Desa Busung Panjang yaitu nelayan di Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga tidak bisa menjual langsung ikan hasil tangkapan ke pembeli, akses pemasaran mereka sangat terbatas sehingga mereka tetap merasakan kesulitan menjual hasil tangkapannya. Mereka saat ini harus menjual ikannya dengan tengkulak dengan harga sangat murah, hal ini yang membuat nelayan tidak bisa keluar dari kemiskinan. Penelitian ini akan mencari faktor kemudian mencari solusi yang dilihat dari kebutuhan nelayan dan kewenangan pemerintah daerah.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Busung Panjang Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga menjelaskan bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Desa Posek Kecamatan Singkep Barat dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang dan untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran desa perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Desa Busung Panjang Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Desa Busung Panjang merupakan pemekaran dari Desa Posek Kecamatan Singkep Barat yang wilayahnya terdiri dari : a. Pulau Noja (Kampung Singkep, Kampung Kedai, Kampung Binton); b. Pulau Panjang (Kampung Moknet); c. Pulau Besi; d. Pulau Buding; e. Pulau Binton; f. Pulau Binton Kecil; g. Pulau Tume; h. Pulau Rapang; i. Pulau Laboh Noja; j. Pulau Sik; dan k. Pulau Jinjing.

Desa Busung Panjang Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Kecamatan Lingga;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Posek dan Desa Tanjung Irat;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakong dan Desa Tanjung Irat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Posek dan Desa Suak Buaya.

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa Busung Panjang, Kecamatan Singkep Barat, tahun 2015 menerima 27 quota Rumah Tanggan Sasaran (RTS) dari 52 usulan Program Rumah Tak layak Huni (RTLH) untuk tahun ini syaratnya cukup ketat yang ditentukan Pemerintah. Kades Busung Panjang mengatakan, syarat yang ditentukan Pemerintah untuk tahun ini, warga yang masuk dalam program

pengentasan kemiskinan, dengan dana sharing Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri ini, dengan ketatnya syarat yang ditentukan pemerintah tersebut banyak usulan yang ditolak, hal ini dikarenakan banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Prosedur direalisasikan usulan RTLH dilakukan tim verifikasi dari lintas instansi terkait yang ditunjuk Pemkab Lingga, yakni BAPPEDA Lingga, Dinas PU dan Dinsosnakertrans. Tiga SKPD ini yang melakukan verifikasi bersama PNPM atas usulan desa kepada Dinsosnakertrans, hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan Dinsosnakertrans Lingga kepada seluruh desa.

Keluarga pra sejahtera di Kecamatan Singkep Barat berjumlah 578. Perkembangan kemiskinan kecamatan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 menurut program perlindungan sosial penduduk berpenghasilan rendah di Kecamatan Singkep Barat, sangat miskin 127 KK, Miskin 181 hampir miskin 258 dan rentan miskin 81 KK. Lapangan usaha Kepala Rumah Tangga Miskin paling banyak di perikanan yaitu 150 KK di Desa Busung Panjang

IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Kemiskinan di Desa Busung Panjang

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa pemerintah sudah menyiapkan beberapa program, pemerintah sudah memberikan perhatian, disebabkan oleh adanya faktor musim, terutama saat musim paceklik yang biasanya ditandai dengan penurunan jumlah hasil tangkapan.

Yang terpenting dari pemberdayaan masyarakat nelayan ini terletak pada peran serta dari pemerintah. Apabila sektor perikanan dan kelautan serta komponen yang ada di dalamnya, dalam hal ini nelayan, memperoleh dukungan dari pemerintah, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan menjadi semakin baik mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan armadanya yang kuat.

Kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial mengarah pada keterbatasan individu atau kelompok dalam mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal, dalam hal ini bersumber dari si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan dan adanya hambatan budaya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar kemampuan seseorang tersebut, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang menghambat seseorang mendapatkan sumber daya

2. Kemiskinan kultural

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa kemiskinan yang terjadi di Desa Busung Panjang adalah kemiskinan kultural. Dimana masyarakat sejak dahulu sulit untuk keluar dari kemiskinan tersebut, mereka hanya berhadap oleh bantuan yang diberikan pemerintah. Pekerjaan sebagai nelayan tradisional lebih banyak mengandalkan kekuatan otot, atau tenaga, sehingga para nelayan tradisional ini mengesampingkan tingkat pendidikan mereka. Namun masalah lain akan muncul ketika para nelayan tradisional ini ingin beralih profesi yang hasilnya menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

mereka. Dengan latar belakang tingkat pendidikan mereka yang rendah maka hal tersebut akan menyusahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

3. Kemiskinan Struktural

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa pemerintah sudah membuat program-program pengentasan kemiskinan bagi nelayan. Termasuk bantuan dan program pemberdayaan namun pelaksanaannya memang kadang tidak sesuai dengan harapan, banyak program yang belum tepat sasaran karena kurang validnya pendataan, sehingga belum semua masyarakat nelayan bisa merasakan bantuan dari pemerintah tersebut. Pemberdayaan ini lebih difokuskan kepada pencerdasan para nelayan itu sendiri agar mereka paham dan mengerti bagaimana memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta bagaimana cara mengentaskan kemiskinan mereka agar mata pencaharian nelayan dapat dipandang sebagai mata pencaharian unggulan. Mengatasi kemiskinan nelayan sebaiknya harus diawali dengan adanya data akurat statistik. Selanjutnya ditindaklanjuti mengenai apa penyebab dari kemiskinan tersebut, apakah karena jeratan utang atau faktor lain. Kemudian cara atau metode untuk menaggulangnya lebih terfokus, pada nelayan-nelayan yang berada pada subordinasi tengkulak. Bagaimanapun juga bahwa penyebab kemiskinan tidaklah sama disemua wilayah, bahkan ukurannyapun bisa berbeda-beda atau tergantung kondisi setempat. Sehingga formula pengentasan kemiskinanpun tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tidak bisa disamakan dengan ukuran

kemiskinan buruh di perkotaan. Bahkan dalam suatu di kabupaten yang sama belum tentu bisa diratakan ukurannya pada desa-desa pesisir yang ada. Program pengentasan kemiskinan nelayan membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini. Selain itu, peranan hukum juga menjadi sangat penting untuk mensejahterakan para nelayan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Nelayan di Desa Busung Panjang masih miskin walaupun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah karena adanya faktor kemiskinan kultural, kemiskinan kultural dimana masyarakat sejak dahulu sulit untuk keluar dari kemiskinan tersebut, mereka hanya berhadap oleh bantuan yang diberikan pemerintah. Pekerjaan sebagai nelayan tradisional lebih banyak mengandalkan kekuatan otot, atau tenaga, sehingga para nelayan tradisional ini mengesampingkan tingkat pendidikan mereka. Pemerintah Kabupaten Lingga sudah memberikan banyak program kemiskinan mulai dari bantuan modal hingga sarana prasarana, namun masih banyak masyarakat miskin di Desa Busung Panjang ini belum dapat merasakannya. Hasil temuan tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Haris Hamdani (2013) tentang Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional (The Factor Of Poverty Causes Traditional Fisherman) diketahui bahwa Sumber daya manusia nelayan tradisional di Kampung Pesisir pada umumnya masih sangat rendah. Kemudian adanya kemiskinan struktural yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah karena masih belum

optimalnya program-program pengentasan kemiskinan bagi nelayan. Termasuk bantuan dan program pemberdayaan yang pelaksanaannya memang kadang tidak sesuai dengan harapan, banyak program yang belum tepat sasaran karena kurang validnya pendataan, sehingga belum semua masyarakat nelayan bisa merasakan bantuan dari pemerintah tersebut. Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah.

Hasil temuan tersebut sesuai dengan penelitian Masyhuri Imron (2003) menjelaskan Kehidupan nelayan identik dengan kemiskinan. Ini terutama dialami oleh buruh nelayan dan nelayan perorangan. Kemiskinan itu muncul bukan hanya dalam bentuk ekonomi, melainkan juga dalam dimensi sosial, budaya bahkan politik..

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat diberikan pengetahuan terhadap teknologi yang dapat membantu nelayan saat melaut seperti GPS yang berfungsi untuk membaca kedalaman, benda-benda pada area dasar yang sekiranya bisa menjadi kawasan ikan, seperti terumbu karang padat atau malah sisa-sisa kapal karam, kemudian Fish Finder yang berguna untuk alat dengan frekuensi tinggi yang digunakan untuk mencari kumpulan ikan, benda-benda ini akan membantu nelayan untuk mendapatkan

- ikan lebih banyak yang akan berpengaruh terhadap penghasilannya.
2. Perlu adanya kerjasama antara pihak terkait berkaitan dengan program kemiskinan seperti pendataan yang tepat, sehingga program kemiskinan tepat sasaran dan kemiskinan di Desa Busung Panjang dapat ditanggulangi.
 3. Agar setiap program tepat sasaran maka para nelayan harus diberikan sosialisasi atau penyuluhan serta bimbingan mengenai setiap bantuan yang diberikan, seperti tujuan dan manfaat setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan. Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Arikunto. Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Hariyoso, S. 2002. *Pembangunan. Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Bandung: Peradaban
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora utama pers
- Moleong, J.2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya
- Nikijuluw, Viktor PH. 2001. *Populasi dan Sosial ekonomi masyarakat pesisir serta strategi pemberdayaan mereka dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu*. Bogor : IPB
- Ritzer,G. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT. Pustaka Cidesindo
- Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial, Makalah Seminar*. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Suryawati, C. 2005. *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. JMPK Vol. 08/No.03/September/2005.

- (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei
- Suyanto, Bagong. 1995. Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya, Universitas Airlangga Press, Surabaya
- Usman, Sunyoto. 2006. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Wrihantolo. Randy R. dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gatoto Winoto (2006) Pola Kemiskinan Di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang
- Masyhuri Imron (2003) Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1
- Sumber lain :**
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga, 2015

Jurnal

- Haris Hamdani (2013) Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional (*The Factor Of Poverty Causes Traditional Fisherman*). Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
- Departemen Sosial. 2009. Data Informasi Kesejahteraan Sosial 2009. Jakarta
- Endang Retnowati (2013) Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural